

ANALISIS KONSEP KEMISKINAN (STUDI KOMPARATIF KONSEP BADAN PUSAT STATISTIK DAN KONSEP EKONOMI ISLAM)

Milda Novtari Isda¹

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Israk Ahmadsyah²

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Nevi Hasnita³

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email : mildanovtariisda@gmail.com¹, isra.leicester@gmail.com², nevi.hasnita@ar-raniry.ac.id³

ABSTRAK

Konsep kemiskinan merupakan suatu konsep yang bersifat multidimensi dan sulit untuk menemukan definisi yang bersifat tunggal. Namun belum ada yang menyepakati dalam satu definisi yang disepakati bersama. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk membandingkan kemiskinan BPS dan Ekonomi Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa persamaan konsep kemiskinan BPS dan Ekonomi Islam yaitu mendefinisikan miskin sebagai orang yang berada dalam kekurangan, menganalisis dari segi pengeluaran, bertujuan memenuhi kebutuhan rumah tangga miskin, dan menjadikan kemiskinan sebagai faktor utama permasalahan ekonomi. Perbedaannya, konsep BPS berorientasi pada kebutuhan bertahan hidup dalam waktu singkat, terfokus kepada kebutuhan materiil, dan parameter yang bersifat sementara. Sedangkan dalam Ekonomi Islam berorientasi pada meningkatkan derajat miskin, memperhatikan kebutuhan materiil dan aqidah, dan parameter yang digunakan dapat diberlakukan kapanpun. Kelebihan konsep kemiskinan BPS adalah data yang dikeluarkan oleh BPS lebih cepat, pendekatan kemiskinan terfokus pada ekonomi makro dan survey yang dilakukan mudah dimengerti masyarakat. Kekurangannya, angka kemiskinan yang ditetapkan terlalu rendah, data kemiskinan bersifat umum, pendekatan kemiskinan mengabaikan sisi pendapatan, dan target sasaran kemiskinan adalah geografis. Kelebihan konsep Ekonomi Islam adalah bersifat komprehensif dan holistik, memahami kemiskinan tidak pada satu bidang, mampu menciptakan banyak metode kemiskinan yang sesuai, pendekatan yang dilakukan materiil dan spiritual. Kekurangannya adalah belum mampu diterapkan secara menyeluruh.

Kata Kunci: Kemiskinan, BPS, Ekonomi Islam.

PENDAHULUAN

Kemiskinan saat ini adalah sebuah konsep yang bersifat multidimensi dan sulit didefinisikan dalam definisi yang bersifat tunggal. Banyak pakar dari beragam disiplin ilmu telah mencoba mendefinisikan konsep kemiskinan ini. Namun, belum ada yang menyepakati dalam satu definisi yang sama. Perspektif yang digunakan pun beragam, mulai dari perspektif ekonomi, sosiologi, hingga perspektif moralitas. Terlepas dari pro kontra dan perdebatan mengenai konsep kemiskinan, namun isu kemiskinan tetap menjadi isu yang sangat penting.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), yang disebut dengan penduduk miskin adalah masyarakat yang memiliki rata-rata nilai pengeluaran per bulan per kapita yang berada dibawah garis kemiskinan. BPS mengelompokkan Garis kemiskinan kedalam dua komponen yaitu Garis kemiskinan Makanan (GKM) diwakili oleh 52 jenis komoditi, beberapa diantaranya yaitu padi, ikan, susu, sayuran, buah-buahan, minyak, dan beberapa jenis lainnya. Garis kemiskinan Makanan (GKM) yang diatur oleh BPS yaitu mengukur nilai pengeluaran kebutuhan makanan yang disetarakan dengan kebutuhan kkalori per hari per kapita yaitu minimal 2100 kkalori. Komponen selanjutnya yaitu Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), pada komponen ini yang diukur adalah kebutuhan minimum berupa perumahan, sandang, pendidikan, hingga kesehatan. Dalam komoditi ini diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan serta 47 jenis komoditi di perdesaan. Garis Kemiskinan per rumah tangga dihitung dari garis kemiskinan per kapita dikalikan dengan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga pada rumah tangga miskin.¹ BPS menggunakan konsep kebutuhan dasar atau *basic needs approach* sebagai dasar pengukuran kemiskinan. Metode tersebut digunakan oleh BPS sejak tahun 1998 supaya hasil perhitungan konsisten dan terbanding dari waktu ke waktu (*apple to apple*).²

Secara umum, pada periode 2006–Maret 2020, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase, perkecualian pada September 2013, Maret 2015, dan Maret 2020. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode tersebut dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak dan adanya pandemi Covid-19 pada Maret 2020. Pada bulan Maret tahun 2020, penduduk miskin di Indonesia diperkirakan mencapai 26,42 juta penduduk. Dibandingkan September 2019, jumlah penduduk miskin meningkat 1,63 juta orang. Sementara jika dibandingkan dengan Maret 2019, jumlah penduduk miskin meningkat sebanyak 1,28 juta orang. Pada bulan Maret tahun 2020 tercatat sekitar 9,78 persen penduduk miskin. Persentase tersebut meningkat sebesar 0,56% poin jika dibandingkan September 2019 dan 0,37%

¹Badan Pusat Statistik, *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2020*, No. 56/07/Th. XXIII, 15 Juli 2020, hal. 8.

²Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, *Profil Kemiskinan di Aceh*, No. 04/01/11/th.XXIII, 15 Januari 2020, hal. 2.

poin dibandingkan dengan Maret tahun 2019 lalu. Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode September 2019–Maret 2020, diperkirakan sebesar 1,3 juta jumlah penduduk miskin di perkotaan meningkat, sedangkan di perdesaan meningkat sebesar 333,9 ribu jiwa. Jika dipersentasekan penduduk miskin perkotaan meningkat dari 6,56% menjadi 7,38% dan di perdesaan meningkat dari 12,60% menjadi 12,82%. Pada bulan Maret tahun 2020, garis Kemiskinan tercatat sejumlah Rp.454.652,- per kapita per bulan yang terbagi dalam komposisi Garis Kemiskinan Makanan (GKM) sejumlah Rp.335.793,- atau 73,86% dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan tercatat sejumlah Rp.118.859,- atau 26,14%. Diperkirakan rumah tangga miskin pada bulan Maret tahun 2020 di Indonesia memiliki anggota rumah tangga sebesar 4,66 jiwa, sehingga besar Garis Kemiskinan secara rata-rata yaitu Rp.2.118.678,- per rumah tangga miskin per bulan.³

Aceh merupakan salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, pada bulan Maret 2020, jumlah penduduk miskin di Aceh sebanyak 814 ribu orang (14,99%), bertambah sebanyak 5 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2019 yang jumlahnya 809 ribu orang (15,01%). Sedangkan jika dibandingkan dengan Maret tahun sebelumnya, jumlah penduduk miskin turun sebanyak 4 ribu orang (15,32%). Selama periode September 2019- Maret 2020, persentase penduduk miskin di perkotaan mengalami kenaikan, sedangkan di perdesaan mengalami penurunan. Di perkotaan, persentase penduduk miskin naik sebesar 0.37 poin (dari 9,47% menjadi 9,84%), sedangkan di daerah perdesaan turun 0.22 poin (dari 17,68% menjadi 17,46%).⁴ Dari data tersebut terlihat bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia maupun di Aceh semakin bertambah, sehingga masalah kemiskinan dianggap sebagai bagian dari masalah penting yang memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan individu dan sosial.

Dalam pandangan ekonomi Islam, kemiskinan didefinisikan sebagai sesuatu yang tidak terpenuhinya kebutuhan pokok dan kesehatan terhadap diri manusia secara menyeluruh, juga tidak meratanya distribusi bahan pokok

³Badan Pusat Statistik, *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2020...*, hal. 1.

⁴Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, *Profil Kemiskinan dan Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Aceh Maret 2020*, No. 30/07/ Th. XXIII, 15 Juli 2020, hal. 1.

terhadap manusia yang membutuhkan. Kelaparan dan kekurangan pangan merupakan bentuk terburuk dari kemiskinan yang dihadapi manusia, dimana kelaparan dan kekurangan merupakan sebab akibat dari kemiskinan, padahal jauh sebelumnya, Islam sudah memerangi kemiskinan.⁵

Menurut Khalifah Umar bin Khattab, yang disebut dengan miskin bukan orang yang tidak memiliki harta, tetapi orang yang memiliki pekerjaan yang tidak mencukupi kebutuhannya. Umar berpendapat orang miskin diberikan dari zakat sesuai dengan kadar yang mencukupinya, bukan sekedar menutupi kelaparannya dengan beberapa suap makanan atau mengurangi kesulitannya dengan beberapa dirham yang tidak merubah kondisi ekonominya.⁶ Menurut Akram Khan, zakat pada prinsipnya dapat mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat. Akan tetapi, karena jumlah penduduk yang menderita karena kemiskinan sangat besar dan bantuan yang diberikan oleh zakat belum memadai, masyarakat secara keseluruhan belum mampu mengentaskan kemiskinan. Zakat dikelola dengan baik bila zakat tidak langsung dibagikan terus habis, tetapi dikembangkan dengan memunculkan lapangan pekerjaan baru. Sehingga masyarakat miskin bisa bekerja dan hasilnya bisa berkembang dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat miskin tersebut.⁷

Di Indonesia, lembaga yang mengelola zakat adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS diamanahkan oleh UU Nomor 23 Tahun 2011 sebagai lembaga negara pengelola zakat sekaligus koordinator organisasi pengelola zakat di Indonesia yang memiliki peran penting dalam menyikapi kondisi kemiskinan. Dalam rangka mendorong upaya pemerintah Indonesia untuk menurunkan angka kemiskinan, BAZNAS merasa perlu secara jelas melihat siapa saja sasaran penerima zakat. Adanya acuan yang jelas dan terukur untuk menentukan kelompok fakir miskin dapat membantu penentuan penerima manfaat serta perencanaan program yang tepat dalam rangka pengentasan kemiskinan di Indonesia.⁸

⁵Hamdani, *Kemiskinan dalam Pandangan Ekonomi Syariah*, Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ngawi, hal. 1.

⁶Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, (Jakarta: Khalifa (Pustaka Al-Kautsar Grup), 2006), hal. 294.

⁷Havis Aravik, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 153.

⁸Publikasi dan Jaringan Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Kajian Had Kifayah*, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2018), hal. 3.

Berdasarkan survei Indeks Kesejahteraan BAZNAS (IKB) yang dilakukan oleh Puskas BAZNAS pada tahun 2019, BAZNAS berhasil mengentaskan kemiskinan pada mustahik prioritas pertama, yaitu mereka yang penghasilan per kapita di bawah GK standar BPS sebanyak 13.202 jiwa. Sementara untuk mustahik prioritas kedua, yaitu kategori kemiskinan Had Kifayah atau berpenghasilan di atas GK BPS dan di bawah standar batas kecukupan minimum/ Had Kifayah, BAZNAS berhasil mengentaskan 6.029 jiwa. Adapun untuk mustahik prioritas ketiga atau kategori rentan miskin dimana penghasilan berada di atas Had Kifayah tetapi masih di bawah nisab zakat, BAZNAS berhasil mentransformasikan mustahik menjadi muzaki sebanyak 1.574 jiwa. Sementara itu, berdasarkan pengukuran di BAZNAS daerah dan LAZ di 34 provinsi atau 514 kabupaten/kota, zakat berhasil mengentaskan mustahik di bawah GK (pendapatan di bawah Rp. 1,9 juta/bulan/KK) sebanyak 113.501 jiwa. Adapun untuk yang berpendapatan Rp. 1,9 juta/ bulan/ KK sampai dengan Rp. 3,1 juta/ bulan/ KK (Had Kifayah) berhasil mengentaskan sebanyak 37.242 jiwa dan yang berpendapatan Rp. 3,1 juta/ bulan/ KK sampai dengan Rp. 4,6 juta/ bulan/ KK (nisab zakat) berhasil mengentaskan sebanyak 7.448 jiwa. Artinya, mereka yang berhasil ditransformasikan adalah mereka yang berhasil naik kelas dari mustahik menjadi muzakki.⁹ Jika dirinci dari penjelasan tersebut maka hasilnya seperti yang terdapat pada tabel berikut:

Jumlah Pengentasan Kemiskinan			
Organisasi Pengelola Zakat	Garis Kemiskinan	Had Kifayah	Nisab Zakat
BAZNAS	13202	6029	1574
BAZNAS Daerah dan LAZ Daerah	113501	37242	7448
Nasional	126703	43271	9022

Dari hasil survei yang telah dipaparkan, terlihat bahwa dana yang dikelola BAZNAS merupakan dana zakat yang ketentuannya telah diatur dalam Islam, tentu sudut pandang yang digunakan oleh BAZNAS dalam melihat konsep kemiskinan adalah sudut pandang ekonomi Islam. Sehingga pada pembahasan ini penulis akan menganalisis konsep kemiskinan berdasarkan konsep ekonomi

⁹Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia 2021*, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2021), hal. 83.

Islam yang terdapat dalam Alquran, hadits, sejarah peradaban Islam, dan pendekatan yang ada saat ini.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang konsep kemiskinan. Dengan demikian judul yang digunakan adalah “*Analisis Konsep Kemiskinan (Studi Komparatif Konsep Badan Pusat Statistik (BPS) Dan Konsep Ekonomi Islam)*”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian berbentuk analisis deskriptif, yaitu cara untuk memecahkan suatu masalah dengan cara mengumpulkan, menyusun, dan mengklarifikasi data yang ada pada masa sekarang.

Data dalam penelitian ini bersumber pada dua sumber data, Data Primer yaitu sumber data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) meliputi wawancara dengan Kepala Seksi Statistik Polkam Badan Pusat Statistik Aceh mengenai konsep, sistematika, pendapat, serta metodologi penghitungan kemiskinan yang terdapat di Badan Pusat Statistik, wawancara dengan Praktisi Baitul Mal Aceh untuk mengetahui pandangan/pendapat terhadap konsep kemiskinan klasik dan modern dalam Ekonomi Islam. Serta kitab fikih yang membahas tentang kemiskinan dalam konsep Ekonomi Islam. Data Sekunder terdiri dari hasil penelitian yang berhubungan dengan konsep kemiskinan serta bahan yang diperoleh dari kamus, artikel, jurnal, ensiklopedia hukum Islam, yang dimaksud sebagai pendukung dalam penyusunan ketajaman analisis penulis.

PEMBAHASAN

Konsep Kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS)

Secara konsep, kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS) termasuk ke dalam kemiskinan makro. Pengukuran kemiskinan makro menyediakan data tentang jumlah penduduk miskin secara agregat (nasional) yang dihitung dari hasil estimasi atau perkiraan sampel data Susenas.¹⁰

¹⁰Titik Kurnianingsih, *Dimensi Kemiskinan*, diakses melalui situs: www.dpr.go.id/Dimensi-Kemiskinan/, hal. 47.

Konsep kemiskinan yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam mengukur angka kemiskinan adalah konsep *Basic needs approach* atau disebut dengan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, bepedoman pada *The World Bank* yang disusun dalam *Handbook on Poverty and Inequality*. Metode ini digunakan oleh BPS sejak tahun 1998 dengan tujuan agar hasil perhitungan konsisten dan terbanding dari waktu ke waktu (*apple to apple*). Dengan konsep ini, BPS berpendapat bahwa kemiskinan sebagai ketidakmampuan yang diukur dari segi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar baik makanan maupun bukan makanan dari sisi pengeluaran. Sehingga disebutkan bahwa penduduk miskin adalah masyarakat yang memiliki rata-rata nilai pengeluaran per bulan per kapita yang berada dibawah garis kemiskinan. Masyarakat miskin menurut BPS terbagi menjadi dua bagian yaitu miskin dan tidak miskin. Data kemiskinan yang dipublikasikan oleh BPS hanya sebatas persentase penduduk miskin, jumlah masyarakat miskin, kedalaman masyarakat miskin (P1) dan keparahan kemiskinan (P2). Data yang dikeluarkan oleh BPS tidak terfokus pada siapa saja penduduk miskin yang semakin terjerumus kedalam kemiskinan, tetapi untuk melihat bagaimana pergerakan rata-rata penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, apakah semakin mendekati garis kemiskinan atau sebaliknya. Jika dilihat rata-rata kemiskinan semakin mendekati angka pada garis kemiskinan, dapat diartikan bahwa program kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah berdampak untuk masyarakat dan ada kemungkinan masyarakat miskin ini dapat keluar dari kemiskinan.¹¹

Rumah tangga yang terdapat di BPS dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu rumah tangga biasa dan rumah tangga khusus. Disebut rumah tangga biasa karena seseorang maupun sekelompok orang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik dan biasanya makan dari satu dapur atau mengurus kebutuhan sehari-hari secara bersama. Komponen yang terdapat dalam rumah tangga biasa yaitu orang yang tinggal bersama dengan anak serta istrinya, orang yang menyewa sebagian bangunan atau kamar dengan mengurus makannya sendiri, keluarga yang tinggal secara terpisah dalam dua bangunan namun makan dari satu dapur, rumah tangga yang menerima pondokan dengan makan atau disebut

¹¹Hasil Wawancara dengan Akhmad Sugito, Kepala Seksi Statistik Polkam Badan Pusat Statistik Aceh, pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul. 10.00 WIB.

dengan indekos dengan jumlah kurang dari 10 orang, pengurus asrama, panti asuhan, serta lembaga permasyarakatan dan sejenisnya yang tinggal sendiri maupun beserta anggota keluarga lainnya dengan satu dapur yang terpisah dengan lembaga pengurusnya, beberapa orang yang menyewa kamar secara bersamaan dengan mengurus makannya masing-masing.

Selanjutnya, disebut rumah tangga khusus karena orang-orang yang di tinggal di panti asuhan, tangsi, lembaga pemasyarakatan, asrama, atau rumah tahanan yang kebutuhan sehari-hari dikelola oleh yayasan/lembaga, dan kelompok yang mondok dengan makan berjumlah lebih dari 10 orang. Orang yang termasuk dalam kategori anggota rumah tangga yaitu orang-orang yang biasa tinggal di suatu rumah tangga (KRT, Suami atau Istri, anak, menantu, orangtua atau mertua, keluarga lainnya, ART atau pembantu rumah tangga yang sudah tinggal selama 6 bulan atau lebih atau kurang dari 6 bulan namun berniat menetap.¹²

Rumah tangga juga terdiri dari orang yang mempunyai karakteristik berbeda-beda dalam hal penerimaan maupun pengeluaran. Dari segi pengeluaran ada yang dapat dilakukan secara bersamaan namun ada pula yang dapat dilakukan secara sendiri. Sedangkan dari segi pendapatan terdapat pendapatan dari upah atau gaji saja, dari usaha saja, dari gaji dan usaha, atau dari selain gaji dan usaha, misalnya dari uang pensiunan, dari bagi hasil, dan lain sebagainya. Kondisi tersebut sangat bergantung dari keaktifan kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga dalam melakukan kegiatan ekonomi. Sehingga untuk mengukur segi penerimaan dan pengeluaran dari rumah tangga perlu diperhatikan catatan pengeluaran dan penerimaan masing-masing anggota rumah tangga yang telah berpenghasilan. Sementara itu Susenas tidak mencatat penerimaan dan pengeluaran dari transaksi keuangan seperti dalam bentuk tabungan, utang, maupun pinjaman uang lainnya.¹³

Di Indonesia, pencatatan terhadap pengeluaran cenderung lebih menggambarkan kondisi ekonomi atau daya beli sebuah rumah tangga. Informasi mengenai pendapatan cenderung tidak digunakan sebagai dasar penghitungan. Sebagai contoh, salah satu indikator pendapatan yang sering

¹²*Ibid.*

¹³Badan Pusat Statistik, *Konsumsi dan Pengeluaran*, diakses melalui situs: www.bps.go.id/subject/5/konsumsi-dan-pengeluaran.

digunakan di negara maju adalah nilai pendapatan yang tercantum dalam laporan pajak penghasilan individu. Jika menggunakan data ini, penghitungan di Indonesia akan muncul masalah. Dengan jumlah penduduk sekitar 256 juta, hanya 27 juta yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dari jumlah tersebut, hanya 10 juta yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan. Pendataan di negara berkembang seperti di Indonesia mengalami kesulitan untuk memperoleh informasi mengenai pendapatan, karena berbagai sebab seperti responden rata-rata tidak mengungkapkan pendapatan sebenarnya karena takut konsekuensi atas informasi yang akan mereka berikan, salah satunya soal pajak. Kemudian kesulitan lainnya yaitu sekitar 60 persen penduduk Indonesia bekerja di sektor informal dengan pendapatan harian dan tidak memiliki dasar pelaporan pendapatan yang akurat. Pekerjaan di sektor formal juga tidak seluruhnya memiliki dasar pelaporan yang akurat, bahkan tidak memiliki NPWP sebagai dasar pengenaan pajak penghasilan.¹⁴

Konsep Kemiskinan Ekonomi Islam

Dalam pandangan Islam, ketika berbicara mengenai kemiskinan maka yang ditekankan adalah upaya perhatian, pembelaan dan perlindungan terhadap kelompok mampu. Pihak yang dianggap mampu ini diharapkan dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki, baik secara individu maupun kelembagaan, sehingga tingkat kemiskinan masyarakat dapat diminimalisir. Apabila kelompok mampu ini tidak mempedulikan nasib kaum miskin, maka dalam QS. Al-Ma'un ayat 1-3 menyebut mereka sebagai para pendusta agama yaitu orang yang menghardik anak yatim dan tidak memberi makan orang miskin. Kemudian dalam ajaran Islam juga mengaitkan antara *rukhsah* dengan memberi makan orang miskin, seperti yang terdapat di QS. Al-Baqarah ayat 184 yang menjelaskan bahwa barang siapa yang tidak dapat melakukan kewajiban utama atau melakukan pelanggaran syariat dalam Islam, maka mereka diberi keringanan dengan membayar fidyah yaitu memberi makanan kepada orang miskin.

Kemiskinan dalam Islam juga tidak bisa dilepaskan dari konsep pemenuhan kebutuhan minimal. Dalam Islam, definisi kebutuhan pokok bukan hanya terkait dengan aspek kebutuhan materiil semata, namun juga terkait

¹⁴*Ibid.* hal. 15.

dengan kebutuhan spiritual dan beribadah kepada Allah. Karena itu dalam QS. Taha ayat 118-119 dan QS. Al-Quraisy ayat 3-4, dijelaskan bahwa kebutuhan pokok itu antara lain adalah dapat melaksanakan ibadah, terpenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan, dan hilangnya rasa takut. Khusus terkait dengan ashnaf fakir dan miskin sebagai kelompok yang berhak menerima zakat seperti yang terdapat dalam QS. At-Taubah ayat 60 dijelaskan bahwa pendekatan penentuan fakir dan miskin adalah dengan menggunakan pendekatan materiil yaitu lebih melihat pada sisi ketidakcukupan pendapatan. Kalaupun ternyata fakir miskin ini juga secara *ruhiyah* atau spiritual miskin, maka tugas lembaga amil zakat untuk melakukan pemberdayaan dan pembinaan, baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi ibadah agamanya. Kombinasi kemiskinan materiil dan spiritual ini disebut sebagai kemiskinan absolut.¹⁵

Pada masa-masa awal pemerintahan Islam di Madinah (623M/1H), pendapatan dan pengeluaran negara hampir tidak ada, sampai di tahun ke 2H negara mulai mempunyai pendapatan dari Ghanimah, kemudian berlanjut dari sumber-sumber pendapatan lainnya. Dari sisi pengeluaran negara, catatan mengenai pengeluaran secara rinci pada masa Rasulullah memang tidak tersedia, namun tidak berarti menimbulkan kesimpulan bahwa sistem keuangan negara yang ada pada waktu itu tidak berjalan dengan baik dan benar. Rasulullah Saw senantiasa memberikan perintah yang jelas dan tegas kepada para petugas yang telah terlatih mengumpulkan zakat. Asas yang dianut dalam APBN adalah asas anggaran berimbang (*balance budget*), artinya semua penerimaan habis digunakan untuk pengeluaran negara (*government expenditure*). Pengaturan APBN yang dilakukan Rasulullah Saw secara cermat, efektif, dan efisien, menyebabkan jarang terjadinya defisit anggaran meskipun sering terjadi peperangan. Untuk mengelola sumber penerimaan negara dan sumber pengeluaran negara maka Rasulullah menyerahkannya kepada Baitul mal. Pada masa Rasulullah Saw, baitul mal lebih mempunyai pengertian sebagai pihak yang menangani setiap harta benda kaum muslimin, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran. Saat itu baitul belum mempunyai tempat khusus untuk menyimpan harta, karena saat itu harta yang diperoleh belum begitu banyak.

¹⁵Irfan Syauqi Beik & Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hal. 75.

Pada masa Abu Bakar, baitul mal makin memainkan peranan penting sebagai kas negara. Pada masa Umar bin Khattab, didirikan baitul mal permanen di ibukota Madinah. Saat itu, zakat dijadikan ukuran fiskal utama dalam rangka memecahkan masalah ekonomi secara umum. Pada masa 6 tahun awal pemerintahan Usman bin Affan, Baitul mal masih berjalan seperti masa sahabat sebelumnya, namun di masa 6 tahun terakhir pemerintahannya mengalami kekacauan, sampai pada masa Ali bin Abi Thalib dikembalikan Baitul mal ke posisi semula.

Kemudian pada masa dinasti kekhalifahan fungsi dan kondisi Baitul mal mulai berubah. Jika di masa sebelumnya Baitul mal dikelola dengan penuh kehati-hatian sebagai amanat Allah dan rakyat. Di masa ini, Baitul mal berada sepenuhnya dibawah kekuasaan khalifah tanpa dapat ditanyakan atau dikritik oleh rakyat, tetapi tidak semua khalifah berlaku seperti itu. Beberapa khalifah yang mengembalikan posisi Baitul mal sesuai dengan tujuan utama Baitul mal bahkan mengalami perkembangan yang pesat. Di antaranya adalah khalifah dinasti Umayyah yaitu Umar bin Abdul Aziz, khalifah dinasti Abbasiyah yaitu Harun Ar-Rasyid, dan khalifah dinasti Turki Usmani yaitu khalifah Usman.

Dengan melihat sejarah, maka dapat dikatakan bahwa baitul mal merupakan pondasi kokoh yang menjadi tempat berlindung berbagai lembaga pemerintahan dalam peradaban Islam selama beberapa periode yang berbeda-beda. Baitul mal mampu memenuhi berbagai kebutuhan dan tuntutan masyarakat dan mendistribusikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan lebih efektif. Jika pada masa Rasulullah dan masa awal kejayaan Islam, baitul mal adalah lumbungnya negara, maka pada saat ini baitul mal menjadi sub bagian terkecil dari pendapatan negara. Di Indonesia yang mengatur pendapatan dan pengeluaran negara adalah BI. Saat ini hanya Aceh yang membandingkan bahwa pendapatan zakat dan infaq menjadi pendapatan negara, diluar Aceh seperti BAZNAS dan LAZ tidak termasuk kedalam pendapatan negara, sehingga sub bagian terkecil pendapatan negara dari baitul mal hanya ada di Aceh. Dalam Islam, pendapatan tidak dapat diabaikan, karena akan mengakibatkan terjadinya hutang. Dan efek dari berhutang adalah posisi masyarakat miskin berada di bawah kemiskinan yaitu fakir bukan lagi miskin.

Sehingga idealnya dalam menentukan kemiskinan adalah memperhatikan pendapatan dan pengeluaran dari masyarakat miskin tersebut.

Gambaran kemiskinan dalam Ekonomi Islam dapat dilihat sesuai dengan kemiskinan yang dibuat oleh ulama fiqih ataupun para fuqaha. Walaupun para fuqaha berbeda-beda pendapat dalam mendefinisikan kemiskinan dan membuat standar atau garis kemiskinan, tetapi terdapat rumusan umum yang dibuat sebagai parameter kemiskinan dalam Ekonomi Islam yaitu orang yang disebut miskin adalah orang yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya diatas 50% dibawah 100%. Parameter ini adalah standar umum yang dapat digunakan dalam menganalisis kemiskinan dalam Ekonomi Islam. Jika dibandingkan dengan menggunakan banyak parameter, parameter umum ini justru memudahkan untuk melihat bagaimana kebutuhan yang mampu mereka penuhi. Selain itu parameter kemiskinan yang diterapkan saat ini tidak dapat mewakili gambaran kemiskinan dalam Ekonomi Islam, baik dari lembaga nasional maupun internasional. Salah satu sebab adalah pengaruh politik pemerintahan yang mengakibatkan parameter kemiskinan dapat diturunkan ataupun dinaikkan sesuai dengan keinginan politik yang berkepentingan saat itu. hal ini menjadi sangat relatif sehingga tidak dapat mewakili gambaran kemiskinan dalam Ekonomi Islam.¹⁶

Dengan perkembangan dunia perekonomian yang sangat dinamis, dimana jenis-jenis harta terus berkembang dari waktu ke waktu, maka dengan pendekatan *ijmali* dimungkinkan untuk mengembangkan harta objek zakat, selama harta tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dari sisi pertimbangan ekonomi, zakat betul-betul memiliki dimensi ekonomi yang kuat ketika komponen zakat penghasilan ini masuk kedalam harta objek zakat yang harus dikeluarkan secara eksplisit disebut dalam nash. Dalam konteks ini, ada tiga pendekatan yang telah dipraktikkan secara global dalam empat dekade terakhir. *Pertama*, tata cara perhitungannya mengikuti kaidah dan ketentuan zakat perdagangan atau zakat emas perak. *Kedua*, mengikuti ketentuan zakat pertanian. Dan yang *ketiga*, mengkombinasikan pendekatan zakat emas dengan

¹⁶Hasil Wawancara dengan Armiadi Musa, Praktisi Baitul Mal Aceh, pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020, pukul. 10.00 WIB.

zakat pertanian melalui penggunaan mekanisme *qiyas syabah* yaitu proses *qiyas* yang dikaitkan dengan dua hal sekaligus.

Pada pendekatan pertama, hitungan zakat profesi atau penghasilan mengikuti standar zakat perdagangan atau emas perak. Masa nishabnya adalah senilai 85 gram emas, terdapat haul (satu tahun kepemilikan) dan kadarnya 2,5 persen dikeluarkan sekali dalam setahun. Namun Fatwa MPU Aceh No. 9 Tahun 2013 Tentang Zakat Kelapa Sawit, Sarang Burung Walet dan Hasil Tambang. Menetapkan nishab emas sebesar 93 gram emas murni dan 672 gram perak murni. Negara yang menggunakan pendekatan emas ini adalah Malaysia, tepatnya di negara bagian Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur, cara menghitung besarnya kewajiban zakat profesi adalah dengan menghitung total penghasilan selama satu tahun, kemudian dikurangi biaya hidup, dan selisihnya jika melebihi nishab maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 persen. Perlu dicatat bahwa besarnya biaya hidup tersebut ditentukan oleh pemerintah dan bukan oleh masing-masing individu.¹⁷

Pendekatan kedua adalah dengan menggunakan standar zakat pertanian. Alasannya yaitu karena adanya kedekatan antara sektor pertanian di zaman Rasulullah Saw dengan sektor jasa di masa sekarang, dimana keduanya merupakan sektor yang mendominasi perekonomian di masanya masing-masing. Dengan argumentasi ini, maka *qiyas* pada zakat pertanian dapat dilakukan. Sesuai dengan dalil yang ada, maka nishab zakat pertanian adalah sebesar 5 *ausaq*, yang di konversi sama dengan 653 kg hasil panen. Adapun kadarnya adalah 5 persen dan dikeluarkannya adalah setiap kali menerima penghasilan, zakat pertanian dikeluarkan pada saat panen dan tidak harus menunggu haul. Dalam konteks Indonesia, maka yang digunakan adalah standar tanaman padi sebagai bahan makanan pokok bangsa ini. Sesuai data terbaru Kementerian Pertanian RI, gabah mengalami penyusutan sebesar 10-11 persen untuk menjadi beras, sehingga 653 kg gabah sebagai hasil panen tanaman padi nilainya setara dengan 582 kg beras. Maka perhitungan nilai nishabnya ada dua kemungkinan yaitu 653 kg gabah dikalikan dengan harga gabah di tingkat petani atau 582 kg beras dikalikan dengan harga beras di tingkat petani. Penentuan harga gabah maupun harga beras didasarkan pada harga resmi yang ditetapkan pemerintah,

¹⁷Irfan Syauqi Beik&Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah...*, hal. 51.

biasanya dengan menggunakan Intruksi Presiden (Inpres) bukan pada harga pasar. Adapun biaya hidup petani tidak dihitung dalam penetapan zakat pertanian ini. Yang dihitung adalah biaya produksi, dimana biaya produksi ini bisa menjadi faktor pengurang zakat.

Pendekatan ketiga adalah dengan mengombinasikan pendekatan pertama dan kedua melalui metode *qiyas syabah*. Dalam konteks zakat penghasilan, nishabnya dianalogikan dengan zakat pertanian, sementara kadar zakatnya dianalogikan dengan zakat emas perak atau perdagangan. Sehingga nishabnya adalah senilai 653 kg hasil panen tanaman dan tidak ada haul, sedangkan kadarnya adalah 2,5 persen. Pertimbangan penggunaan kadar 2,5 persen ini karena tingkat keterlibatan usaha manusia yang sangat tinggi. Hikmah yang bisa diambil dibalik perbedaan nilai kadar zakat terletak pada tingkat keterlibatan usaha manusia. Semakin tinggi tingkat usaha dan keterlibatan manusia maka semakin kecil kadar zakat yang dikenakan padanya.¹⁸

Selain pendekatan yang telah penulis paparkan, adapula pendekatan terbaru yang diperkenalkan oleh Irfan Syauqi Beik yaitu kuadran CIBEST (*Center of Islamic Business and Economic Studies-IPB*). Kuadran CIBEST ini terdiri dari empat kuadran yaitu:



Pembagian kuadran didasarkan pada kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan materiil dan spiritual. Digunakannya rumah tangga sebagai *unit of analysis* karena Islam memandang bahwa unit terkecil dalam masyarakat adalah keluarga atau rumah tangga. Karena itu, dalam melihat tingkat kemiskinan, maka rumah tangga ini harus dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh. Pendekatan ini berbeda dengan BPS yang melihat kemiskinan dari perspektif individu. Kuadran CIBEST membagi kemampuan rumah tangga untuk

¹⁸*Ibid*, hal. 54.

memenuhi kebutuhan material dan spiritual ke dalam dua tanda yaitu tanda positif (+) dan negatif (-). Tanda positif (+) artinya rumah tangga tersebut mampu memenuhi kebutuhannya dengan baik. sementara tanda negatif (-) berarti rumah tangga tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhannya dengan baik. Dengan pola seperti ini, maka akan didapat empat kemungkinan yaitu tanda (+) pada pemenuhan kedua kebutuhan material dan spiritual, tanda (+) pada salah satu kebutuhan saja, apakah tanda (+) pada kebutuhan material ataupun tanda (+) pada kebutuhan spiritual saja, serta tanda (-) pada kedua kebutuhan material dan spiritual.

Empat kemungkinan inilah yang kemudian melahirkan empat kuadran, dimana sumbu horizontal melambangkan garis kemiskinan materiil dan sumbu vertikal melambangkan garis kemiskinan spiritual. Pada kuadran pertama, rumah tangga mampu memenuhi kebutuhan materiil dan spiritual sehingga tanda keduanya adalah (+). Inilah kuadran kesejahteraan. Sejahtera itu adalah manakala rumah tangga atau keluarga dianggap mampu baik secara materiil maupun secara spiritual. Secara ekonomi produktif, secara ibadah juga produktif. Kemungkinan kedua adalah rumah tangga mampu memenuhi kebutuhan spiritual (+) akan tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan materiilnya (-) dengan baik. Kondisi ini, sebagaimana direfleksikan oleh kuadran II, mencerminkan kondisi rumah tangga yang berada pada kategori kemiskinan materiil. Sebaliknya, pada kuadran III, kondisi yang terjadi adalah rumah tangga tergolong mampu secara materiil (+) namun tergolong tidak mampu secara spiritual (-), sehingga mereka berada pada kategori kemiskinan spiritual. Yang terburuk adalah posisi rumah tangga pada kuadran IV. Pada kuadran ini, rumah tangga atau keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan materiil dan spiritualnya secara sekaligus, sehingga tanda keduanya adalah (-). Inilah kelompok yang berada pada kategori kemiskinan absolut. Miskin secara materi dan miskin secara rohani.

Manfaat dari kuadran CIBEST ini adalah terkait dengan pemetaan kondisi keluarga atau rumah tangga, sehingga dapat diusulkan program pembangunan yang tepat, terutama dalam mentransformasi semua kuadran yang ada agar bisa berada pada kuadran I (kuadran sejahtera). Pada rumah tangga yang berada di kuadran II, maka program pengentasan kemiskinan melalui peningkatan skill

dan kemampuan rumah tangga, serta pemberian akses permodalan dan pendampingan usaha, dapat secara efektif dilakukan. Sementara bagi rumah tangga di kuadran III, program yang perlu dikembangkan adalah bagaimana mengajak mereka untuk melaksanakan ajaran agama dengan lebih baik. Sedangkan bagi rumah tangga di kuadran IV, maka yang harus dilakukan adalah memperbaiki sisi *ruhiyah* dan mentalnya terlebih dahulu, baru kemudian memperbaiki kondisi kehidupan ekonominya. Membangun karakter yang berakhlakul karimah adalah modal yang sangat berharga dalam mentransformasi kaum dhuafa agar menjadi lebih sejahtera. Perlu disadari bahwa usaha mentransformasi kaum dhuafa di kuadran IV ini adalah yang paling berat dan menantang.

Hal penting berikutnya adalah bagaimana menentukan standar kebutuhan minimum materiil dan spiritual ini. Kebutuhan materiil dapat didasarkan pada analisis kebutuhan pokok, minimal mencakup kebutuhan makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Bisa juga ditambahkan kebutuhan akan transformasi dan komunikasi yang semakin diperlukan oleh masyarakat saat ini. Adapun kebutuhan spiritual minimal adalah terkait dengan hal-hal pokok yang harus dipenuhi oleh masyarakat terkait dengan kewajiban agama. Dalam konteks kuadran CIBEST, maka ada lima variabel yang dapat didefinisikan sebagai kebutuhan spiritual minimal yaitu pelaksanaan shalat, puasa, zakat, lingkungan keluarga, dan lingkungan kebijakan pemerintah. Untuk menilai bagaimana kondisi materiil dan spiritual rumah tangga, maka pemerintah atau otoritas terkait harus melakukan survei secara berkala, minimal satu kali dalam setahun. Dengan survei ini dapat diperoleh gambaran secara riil mengenai kondisi kemiskinan yang terjadi di tengah masyarakat. Juga dapat dibuat pemetaan rumah tangga yang ada, berapa persen yang berada di kuadran I, kuadran II, kuadran III dan kuadran IV.¹⁹

Kemudian salah satu solusi dalam mengurangi kemiskinan adalah dengan memaksimalkan pendapatan dari sumber zakat yaitu optimalisasi potensi zakat di Aceh maupun nasional. Menggali sumber-sumber filantropi lain yang ada di Indonesia juga di Aceh. Sebab sumber filantropi dalam Islam luar biasa banyak yang bisa mengurangi angka kemiskinan, namun tidak untuk mengentaskan atau

¹⁹ *Ibid*, hal. 78.

menghilangkan kemiskinan, karena hal tersebut sudah menjadi hukum alam, kemiskinan tidak dapat dihapus hanya dapat bergeser saja. Sumber filantropi Islam saat ini seperti *power* raksasa yang sedang tidur, sehingga masih belum maksimal dalam memanfaatkan sumber penghasilan zakat maupun filantropi lain. Menggali potensi pada diri masyarakat muslim sendiri tanpa perlu berhutang keluar negeri juga menjadi salah satu solusi untuk masalah kemiskinan saat ini.²⁰

Perbandingan Konsep Kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Ekonomi Islam

Persamaan antara konsep kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dengan konsep Ekonomi Islam yaitu sama-sama menganggap bahwa orang miskin adalah orang yang tidak memiliki atau dalam kekurangan sehingga harus ditolong oleh orang atau pihak yang mampu. Konsep yang digunakan oleh BPS merupakan pendekatan kemiskinan makro yang dilihat dari dimensi pengeluaran, dalam Islam salah satu pertimbangan dalam melihat kemiskinan juga dilihat dari aspek pengeluaran tetapi juga memasukkan aspek pendapatan. Konsep BPS bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga miskin yang membuat rumah tangga miskin mampu bertahan hidup pada saat itu. Sementara pada konsep Ekonomi Islam memenuhi kebutuhan hidup dan usaha untuk melepaskan diri dari kemiskinan. Kemiskinan pada BPS dan Ekonomi Islam menjadi permasalahan utama yang harus diatasi dalam memajukan perekonomian negara dan menjadi pusat perhatian pemerintah di dalam suatu negara.

Sedangkan dari segi perbedaan dapat dilihat bahwa BPS hanya berbicara pada aspek pengeluaran minimum yang diperlukan untuk bertahan hidup dengan kondisi saat ini, sementara dalam Ekonomi Islam dana zakat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar juga bisa digunakan sebagai alat pemberdayaan dan pengembangan skill dan diharapkan mampu mengubah posisi mustahik menjadi muzakki. Kemiskinan BPS terfokus pada kebutuhan

²⁰Hasil Wawancara dengan Armiadi Musa, Praktisi Baitul Mal Aceh, pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020, pukul. 10.00 WIB.

materiil, sedangkan pada Ekonomi Islam selain mempertimbangkan kebutuhan materiil, juga melihat dari kebutuhan spiritual seseorang. Parameter garis kemiskinan yang digunakan oleh BPS tidak dapat mewakili kemiskinan secara menyeluruh, sedangkan dalam Ekonomi Islam, parameter umum yang digunakan dalam menentukan seseorang miskin dapat digunakan sepanjang masa karena tidak ada penentuan secara khusus pada parameter kemiskinan Islam, dan Islam membebaskan kepada masyarakat atau pemerintah untuk melihat kebutuhan yang berkembang pada masa tersebut. Indikator kemiskinan yang digunakan oleh BPS adalah garis kemiskinan berdasarkan pada garis kemiskinan makanan dan non makanan, Ekonomi Islam mengukur garis kemiskinan dengan melihat mereka yang berada dalam kekurangan dan kebutuhan dan tidak terkhusus pada makanan atau non makanan saja. Pencapaian dalam kemiskinan BPS belum mampu mengubah posisi masyarakat miskin untuk lepas dari masalah kekurangan harta. Sedangkan sejarah dalam Islam pernah mencatat bahwa kemiskinan bukan lagi pada permasalahan kekurangan harta, tetapi posisi miskin adalah posisi seseorang yang diurutkan sesuai dengan jumlah harta yang dimilikinya. Maksudnya adalah pada masa kejayaan Islam yaitu masa pemerintahan Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz, orang yang kekurangan harta tidak lagi dijumpai, masyarakat sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya secara mandiri. Sehingga pada saat itu kemiskinan bukan lagi pada definisi kekurangan harta.

Kelebihan dari konsep kemiskinan BPS yaitu BPS menjadi lembaga referensi resmi angka kemiskinan di Indonesia, data yang dikeluarkan BPS juga lebih cepat sehingga berguna untuk menganalisis kemiskinan dan solusi yang harus dilakukan, pendekatan kemiskinan yang dilakukan BPS terfokus pada pendekatan ekonomi makro dilihat dari sisi pengeluaran memenuhi kebutuhan dasar minimum, dan pendekatan pengeluaran yang dilakukan BPS mudah diterapkan dalam melakukan survey langsung ke masyarakat miskin. Sedangkan dari segi kekurangan BPS adalah angka kemiskinan yang ditetapkan terlalu rendah, data kemiskinan tersebut juga masih bersifat umum, sehingga tidak dapat mewakili gambaran kemiskinan di Indonesia, pendekatan BPS tidak memperhatikan penerimaan dan pengeluaran dari transaksi keuangan rumah tangga miskin yang menyebabkan mereka terjerumus dalam permasalahan

hutang, dan data kemiskinan yang dikeluarkan oleh BPS hanya dapat digunakan untuk target sasaran geografis bukan individu rumah tangga.

Kelebihan dari konsep kemiskinan Ekonomi Islam yaitu Ekonomi Islam memiliki sifat komprehensif dan holistik, Ekonomi Islam memahami kemiskinan dari segala aspek secara menyeluruh, ekonomi Islam mampu menciptakan banyak metode dalam melihat kemiskinan, sehingga pendekatan Ekonomi Islam tidak terfokus pada angka/nilai komoditi tetapi juga personaliti yang dimana Ekonomi Islam mampu menghubungkan kegiatan materiil (dunia) dengan spiritual/ibadah (akhirat), hal inilah yang menjadikan Ekonomi Islam dapat diberlakukan sepanjang masa. Kekurangan Ekonomi Islam tidak terdapat pada konsep yang ada dalam Ekonomi Islam, akan tetapi lebih kepada hambatan dari usaha untuk mempraktekkan kembali Ekonomi Islam dan mengembalikan kejayaan Ekonomi Islam seperti masa Rasulullah dan awal Islam. Hambatan yang ada disebabkan oleh negara-negara adidaya yang masih menguasai perekonomian dunia. Ekonomi Islam juga tidak dapat diterapkan di negara muslim atau mayoritas muslim karena negara tersebut sudah lebih dulu mengadopsi prinsip non muslim, sehingga sulit untuk mengubah sistem yang sudah lama ada. Ekonomi Islam untuk saat ini masih menjadi sub bagian terkecil dari perekonomian suatu negara, masalah ini juga menjadikan Ekonomi Islam tidak dapat bergerak bebas dan mengambil peran penting dalam perekonomian. Selain itu faktor politik negara juga sangat berpengaruh dalam hal ini. Negara membutuhkan pemimpin yang taat dan takut kepada Allah, sehingga segala sesuatu yang dilakukan akan berorientasi pada kebaikan dunia dan akhirat yang berlandaskan pada ketetapan Syariat Allah.

KESIMPULAN

Konsep kemiskinan dalam Ekonomi Islam adalah konsep yang mampu menggambarkan kemiskinan sebenarnya, sehingga konsep ini dapat dijadikan sebagai patokan garis kemiskinan di Indonesia, dengan parameter umum yaitu kemampuan memenuhi kebutuhan hidup diatas 50% dan dibawah 100%. Untuk pendekatan konsep Ekonomi Islam, penulis menyarankan untuk menggunakan pendekatan kemiskinan CIBEST yang dikembangkan oleh Irfan Syauqi Beik dengan melihat pada kesejahteraan, kemiskinan material, kemiskinan spiritual,

dan kemiskinan absolut. Karena pendekatan ini dapat memodifikasi pendekatan kemiskinan makro pada BPS terkait garis kemiskinan per kapita per bulan menjadi garis kemiskinan per rumah tangga per bulan yang terdapat pada konsep kemiskinan mikro, dimana rumah tangga harus dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh, dan penambahan yang dilakukan dalam pendekatan metode CIBEST adalah kebutuhan yang dilihat dari sisi kebutuhan spiritual. Oleh sebab itu penulis berpendapat bahwa konsep ini mampu merangkul dan menggabungkan kelebihan dari masing-masing konsep kemiskinan yang ada di Indonesia, menjadi satu konsep baru yang disempurnakan.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, Profil Kemiskinan dan Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Aceh Maret 2020, No. 30/07/ Th. XXIII, 15 Juli 2020.

Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, Profil Kemiskinan di Aceh, No. 04/01/11/th.XXIII, 15 Januari 2020.

Badan Pusat Statistik, Konsumsi dan Pengeluaran, diakses melalui situs: www.bps.go.id/subject/5/konsumsi-dan-pengeluaran.

Badan Pusat Statistik, Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2020, No. 56/07/Th. XXIII, 15 Juli 2020.

Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.

Hamdani, Kemiskinan dalam Pandangan Ekonomi Syariah, Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ngawi.

Havis Aravik, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer, Jakarta: Kencana, 2017.

Irfan Syauqi Beik&Laily Dwi Arsyianti, Ekonomi Pembangunan Syariah, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.

Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab, Jakarta: Khalifa (Pustaka Al-Kautsar Grup), 2006.

Publikasi dan Jaringan Pusat Kajian Strategis BAZNAS, Kajian Had Kifayah, Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2018.

Pusat Kajian Strategis BAZNAS, Outlook Zakat Indonesia 2021, Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2021.

Subdirektorat Statistik Rumah Tangga, Pengeluaran Untuk Konsumsi Penduduk Indonesia Per Provinsi, Badan Pusat Statistik Indonesia, 2019.

Titik Kurnianingsih, Dimensi Kemiskinan, diakses melalui situs: www.dpr.go.id/Dimensi-Kemiskinan/.